

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 3, Nomor 8, November 2024, Halaman 92-97
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.2986-7002)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14268539>

Penerapan Pendidikan Demokrasi Substantif bagi Siswa/I Kelas XII 5 SMAN 35 Jakarta dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Ideal

¹Najwa Rosyidah, ²M. Aliev Andika Putra, ³Aqila Hifdzil Qowy, ⁴Nisa Auliya Ahmad, ⁵Kayus Kayowuan Lewoleba, ⁶Subakdi, ⁷Suprima

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2410611143@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah dan untuk mewujudkan pemilihan yang berdasarkan akal budi atau rasio dengan cara menelaah pemikiran atau visi misi para paslon dengan kritis sehingga nilai nilai demokrasi substantif dapat tercapai. Demokrasi substantif sendiri adalah ketika suatu pemerintahan dapat merealisasikan keinginan masyarakat dalam suatu negara, yang dimana masyarakat sendiri memiliki kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. Siswa kelas XII sendiri baru memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan juga masih awam dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih suatu paslon, maka dari itu kegiatan sosialisasi ini dilakukan. Kegiatan sosialisasi ini berupa pemberian materi tentang pemilu dan juga pilkada, lalu ada sesi tanya jawab dan sebuah tes setelah pemberian materi untuk melihat apakah para siswa sudah memahami isi dari materi tersebut atau tidak. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar para siswa dapat memilih pemimpin dengan kritis dan memberi pemahaman tentang pemilu serta pilkada. Kegiatan ini diharapkan agar para generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam politik dan juga mewujudkan suatu pemerintahan yang ideal.

Kata kunci: *Demokrasi substantif, Ideal, Rasio*

Abstract

In order to welcome the election of regional heads and to realize elections based on reason or ratio by critically examining the thoughts or vision and mission of the candidate pairs so that substantive democratic values can be achieved. Substantive democracy itself is when a government can realize the wishes of the people in a country, where the people themselves have the highest sovereignty in a democracy. Class This socialization activity takes the form of providing material about elections and regional elections, then there is a question and answer session and a test after providing the material to see whether the students have understood the content of the material or not. This socialization activity aims to enable students to choose leaders critically and provide an understanding of elections and regional elections. It is hoped that this activity will enable the younger generation to actively participate in politics and also create an ideal government.

Keywords: *Substantive Democracy, Ideal, Ratio*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 25 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

PENDAHULUAN

Demokrasi substantif adalah suatu kondisi ketika pemerintahan dapat mewujudkan keinginan para warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Demokrasi substantif sendiri sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang mempresentasikan keinginan para warga negara, dengan demikian, warga negara pun turut aktif berpartisipasi dalam menggunakan hak untuk berpendapat dan politiknya.

Pemilihan umum Daerah (PILKADA) serentak 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pilkada tahun 2024 di Indonesia dilaksanakan secara serentak bagi daerah dengan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Sistem Pilkada serentak tahun 2024 ini adalah yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, sekaligus yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten/kota di Indonesia. Menurut laporan data dari KPU, total daerah yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia adalah sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Pemilihan umum (election) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh

suatu negara. Dalam negara demokrasi, pemilu adalah kunci untuk membangun demokrasi. Di Indonesia, pemilu merupakan ekspresi nyata dari demokrasi dan sarana dimana rakyat dapat menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Pemilu berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan asas pemilu langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator dari pelaksanaan legitimasi tertinggi kekuasaan negara oleh rakyat (kedaulatan rakyat).

Semakin tinggi tingkat partisipasi politik, semakin terlihat bahwa masyarakat mengikuti, memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi politik yang rendah umumnya menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghargai atau tertarik dengan isu atau kebijakan pemerintah. Rendahnya partisipasi politik penduduk tercermin dari sikap golongan putih (kosong) dalam pemilu. Karena itu juga sangat penting untuk mengontrol tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan parlemen, karena rendah atau tingginya partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting berjalannya proses pemilu.

Salah satu bagian masyarakat Jakarta yang akan memberikan hak pilih pada tanggal 27 November 2024 adalah pemilih pemula. Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga Negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki pengalaman memilih (voting) pada pemilu sebelumnya. Namun, ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik (Saputra2017).

Pemilih muda dalam pemilihan umum merupakan pemilih generasi baru dengan karakteristik, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Kebanyakan dari mereka adalah pelajar. Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang baik pada kelompok ini, mereka menggunakan alat-alat teknis yang rumit dari telepon seluler, laptop, tablet, dan banyak perangkat lainnya. Mereka juga sangat bagus di media sosial dan jaringan seperti Twitter, Facebook, LinkedIn, dll.

METODE

Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif sendiri merupakan sebuah metode dengan cara mengumpulkan data yang terstruktur melalui instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran yang kami pakai dalam sosialisasi ini adalah post-test . Kami akan memaparkan materi Sebelum kami memberikan post-tes kepada siswa/i, adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu pengertian pilkada, sejarah pilkada di Indonesia, alasan kenapa harus diadakannya pilkada, dan alasan warga negara wajib ikut berkontribusi dalam pilkada di Indonesia.

Metode ini digunakan dengan tujuan untuk dapat melihat seberapa paham dan antusiasme nya para siswa/i kelas XII 5 SMAN 35 JAKARTA PUSAT terhadap tema yang kita usung, yaitu Penerapan Pendidikan Demokrasi Substantif Bagi siswa/i kelas XII 5 SMAN 35 JAKARTA PUSAT dalam Mewujudkan partisipasi politik bagi generasi z terhadap pemilihan kepala daerah 2024. Metode ini kami gunakan untuk dapat melihat fakta berdasarkan data yang terkumpul melalui post-test. Dari post-test itulah kami dapat melihat bagaimana siswa/i kelas XII 5 SMAN 35 JAKARTA PUSAT memahami arti atau paham dari demokrasi substantif, dan seberapa pentingnya bagi mereka untuk mempelajari dan menerapkan demokrasi.

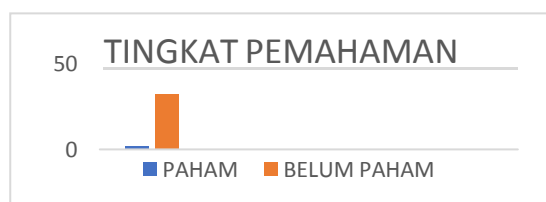
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dengan tema Pendidikan Demokrasi Substantif yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2024 di SMAN 35 JAKARTA, yang diikuti oleh 34 orang siswa/i kelas XII 5. Pada kegiatan sosialisasi ini kami menggunakan materi yang cukup menarik dengan PPT dan penyampaian yang interaktif mengenai sistem pilkada di Indonesia. Sebelum kami memaparkan materi terlebih dahulu kami melakukan pengenalan kepada siswa/i kelas XII 5 dan melakukan beberapa permainan agar siswa/i tidak merasa tegang atau jenuh saat kami memaparkan materi nantinya.



Gambar 1. Pembukaan sosialisai

Setelah tahap pengenalan selesai kami memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa/i terkait dengan materi yang nanti nya akan kami paparkan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa/i terkait dengan pilkada.



Gambar 2. Tingkat pemahaman siswa sebelum pemaparan materi

Setelah itu kelompok kami melakukan pemaparan materi. Selama sesi pemaparan materi Siswa/i terlihat sangat serius dalam mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami.

Adapun beberapa Sub materi yang kami sampaikan yaitu pengertian pilkada, perbedaan pilkada dengan pemilu, sejarah pilkada, dan alasan mengapa warga negara yang sudah memenuhi syarat wajib berkontribusi dalam pilkada di Indonesia. Setelah semua pemaparan materi telah selesai lalu kami melakukan sesi tanya jawab siswa/i apabila ada materi yang masih mereka kurang pahami, ada beberapa siswa/i yang memberikan pertanyaan kepada kami dan itu membuktikan bahwa siswa/i sangat tertarik dengan materi yang telah kami paparkan.

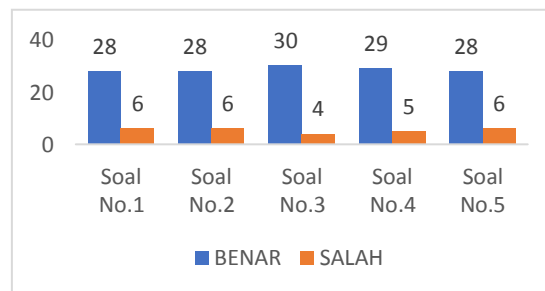
Setelah kami melakukan pemaparan materi dan kegiatan selanjutnya adalah para siswa/i mengerjakan Post-Test yang telah kami siapkan melalui media Quiziz. Semua pertanyaan yang kami berikan dalam Post- Test ini terkait dengan materi yang telah kami paparkan dengan tujuan untuk dapat melihat seberapa paham dan antusiasme nya para siswa/i kelas XII 5 SMAN 35 JAKARTA PUSAT terhadap tema yang kita usung, yaitu Penerapan Pendidikan Demokrasi Substantif Bagi siswa/i kelas XISMAN 35 JAKARTA PUSAT dalam

Mewujudkan partisipasi politik bagi generasi z terhadap pemilihan kepala daerah 2024. adapun pertanyaan Post-Test yang diberikan kepada siswa/i, yaitu:

1. Apa akibat dari rendahnya partisipasi pemilih dalam suatu pemilihan umum?
2. apa yang dimaksud dengan pemilu yang bersifat "luber" (langsung, umum, bebas, dan rahasia)?
3. Mengapa politik uang (money politics) dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi?
4. Jika terjadi sengketa hasil pilkada, lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya?
5. Siapa yang berperan sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pilkada?
6. Bagaimana jika seorang calon kepala daerah dalam pilkada diduga terlibat dalam politik uang (money politics)?
7. Salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan pilkada adalah masa kampanye. Apa tujuan utama dari masa kampanye?
8. Salah satu masalah yang sering muncul dalam pilkada adalah politik dinasti. Apa yang dimaksud dengan politik dinasti?

9. Apa yang terjadi jika hanya adasatu pasangan calon yang maju dalam pilkada?
 10. Apa yang dimaksud dengan "pemilihan langsung" dalam konteks pilkada?

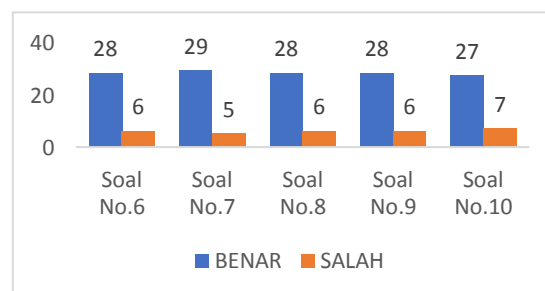
Post-Test tersebut berisi 10 pertanyaan yang kami berikan kepada siswa/i kelas XII.5 SMAN 35 JAKARTA yang jawabannya berupa pilihan ganda.



Gambar 3. Diagram batang soal No 1-5

Pada soal pertama, sebanyak 28 dari 34 siswa/i dapat menjawab soal dengan benar. Pada soal pertama ini membahas mengenai dampak negatif apabila terjadi rendahnya partisipasi pemilih dalam suatu pemilihan umum, hal ini diharapkan agar siswa semakin meningkatkan partisipasinya dalam pemilihan umum untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari rendahnya partisipasi pemilih. Pada soal ke-dua, sebanyak 28 dari 34 siswa/i menjawab soal dengan benar. Pada soal kedua ini membahas mengenai asas dari pemilu, kami ingin memastikan bahwa para siswa/i sudah mengetahui dan memahami asas tersebut karena banyak generasi muda yang mungkin belum memahami nilai fundamental ini karena kurangnya pendidikan politik yang mendalam. Pada soal ke-tiga, sebanyak 30 dari 34 siswa/i menjawab soal dengan benar. Pada soal ketiga ini membahas mengenai salah satu ancaman demokrasi yaitu politik uang. Politik uang merusak keadilan dalam pemilu dengan membeli suara pemilih. Ini menciptakan pemerintahan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu daripada kepentingan rakyat. Sebagai generasi yang peduli pada perubahan, siswa/i perlu memahami bahwa melawan politik uang adalah langkah menuju demokrasi yang lebih sehat.

Pada soal ke-empat, sebanyak 29 dari 34 orang siswa/i menjawab dengan benar. Soal ini memiliki pertanyaan berupa tentang siapa yang mengurus dan mengadili kalau-kalau terjadi sengketa dalam pilkada. Pertanyaan ini mengacu jika ada suatu sengketa dalam pilkada, kami harap para siswa/i dapat mengetahui dan memberikan pendapat yang kritis tentang sengketa tersebut. Pada soal ke-lima, sebanyak 28 dari 34 orang siswa/i menjawab dengan benar. Soal ini menanyakan tentang siapa yang berperan menjadi pengawas baik pada saat pemilu maupun pilkada. Soal ini bertujuan agar para siswa/i dapat memberikan peran aktif seperti memberikan saran akan kebijakan dan pengawasan pihak Lembaga.



Gambar 4. Diagram batang soal No 6-10

Kemudian pada Soal ke-enam sebanyak 28 dari 34 orang siswa/i menjawab dengan benar juga tentang bagaimana jika suatu paslon terlibat dalam politik uang. Politik uang sendiri adalah suatu Upaya melakukan pembelian suara oleh paslon baik dalam pemilu maupun pilkada. Dalam soal ini para siswa/i diharapkan menjadi pribadi yang jujur, kritis, dan positivistik dalam perbuatan politik uang oleh paslon. Pada soal ke-tujuh, sebanyak 29 dari 34 siswa/i menjawab soal dengan benar. Soal

ketujuh ini membahas salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan pilkada yaitu masa kampanye. Sebagai pemilih pemula dalam pilkada dan pemilu, siswa/i harus memahami pentingnya tahap kampanye karena merupakan bagian dari proses demokrasi yang memiliki dampak besar pada hasil pilkada maupun pemilu. Dengan memahami masa kampanye, sebagai seorang pemilih, siswa/i dapat menilaisejauh mana kandidat jujur, realistis, dan relevan dalam menyampaikan programkerjanya.

Pada soal ke-delapan, sebanyak 28 dari 34 siswa/i menjawab soal dengan benar. Soal kedelapan ini membahas salah satu masalah yang sering dihadapi dalam pilkada maupun pemilu yaitu politik dinasti. Politik dinasti adalah praktik politik dimana kekuasaan dikuasai okeh keluarga tertentu secara turun-menurun. Dengan adanya pertanyaan seperti ini, diharapkan para siswa/i dapat ikut serta dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghindari adanya praktik nepotisme. Pada soal Ke-sembilan terdapat 28 siswa memahami bahwa jika hanya ada satu pasangan calon yang maju dalam pilkada maka pemilihan dilakukan dalam skema calon tunggal melawan kotak kosong. sedangkan siswa yang tidak mengetahui sebanyak 6 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sudah mengetahui proses yang dilakukan jika hal tersebut terjadi sesuai dengan peraturan KPU mengenai calon tunggal dalam pilkada. Pada soal Ke- sepuluh terdapat 27 siswa memahami apa itu pemilihan langsung dalam pilkada dan 7 siswa yang belum memahami. Data tersebut menunjukkan bahwa siswa memahami bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan warga negara berhak memilih Kepala Daerah melalui pemungutan suara. Penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh masyarakat sangat erat kaitannya dengan demokrasi.

Setelah para siswa/i mengerjakan Post-Test dapat dilihat bahwa lebih dari sebagian besar siswa/i kelas XII.5 SMAN 35 JAKARTA telah mehami apa itu pilkada di Indonesia, dan mereka lebih yakin untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada karena telah memiliki pahaman yang cukup luas mengenai pilkada. Sebagai rangkaian akhir dari kegiatan sosialisasi ini kami meminta kepada salah satu siswa/i untuk membuat kesimpulan dari kegiatan ini, dan kesimpulan dari salah satu murid tersebut sangat rinci sesuai dengan semua materi yang telah kami paparkan mulai dari penjelasan apa itu pilkada, bagaimana awal mula terjadinya pilkada, sejarah pilkada, dan apa tujuan pilkada itu diselenggarakan. Berdasarkan kesimpulan yang telah di berikan oleh mereka, menunjukkan hasil adanya peningkatan pemahaman demokrasi substantif dan meningkatnya kesadaran untuk bersikap demokrasi dan kritis pada proses pilkada di Indonesia. Hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi mereka, kami, dan juga bangsa Indonesia kedepannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Pendidikan Demokrasi Substantif : Pilkada di Indonesia Sosialisasi yang kami lakukan ini

mengangkat sub tema Demokrasi Substantif engan materi pilkada di Indonesia. kami ingin memberikan pemahaman lebih terkait dengan dengan pilkada di Indonesia dan untuk menumbuhkan jiwa demokrasi kepada Generasi Z. Indonesia mengalami transformasi demografis yang signifikan, di mana Generasi Z yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an sekarang menjadi kelompok usia yang semakin besar dan berpengaruh dalam struktur masyarakat. Generasi ini dikenal sebagai digital natives, yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Keberadaan mereka di era digital mempengaruhi cara mereka berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 merupakan momen penting dalam sistem demokrasi Indonesia, karena akan menentukan pemimpin daerah yang akan mengelola pemerintahan lokal dan melaksanakan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Partisipasi aktif semua lapisan masyarakat, termasuk Generasi Z, adalah kunci untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh para pemimpin daerah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh komunitas, terutama generasi muda yang menjadibagian besar dari populasi.

Dalam pemaparan materi kelompok kami membahas materi pilkada di Indonesia mulai dari pengertian bahwa pilkada itu sebagai wadah untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan, selanjutnya yaitu kelompok kami menjelaskan sejarah pilkada yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan sejarah demokrasi di indonesia mulai dari era awal kemerdekaan (1945-1958) yang dimana pada masa ini kepala daerah dipilih oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya memasuki era orde lama (1959- 1965) pada periode ini Indonesia menerapkan sistem

demokrasi dipimpin dibawah presiden Soekarno, dimana kepala daerah tidak lagi dipilih melalui DPRD melainkan ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat yang disebabkan oleh terbitnya Dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959. Kemudian memasuki Resformasi dan Era Otonomi Daerah (1999-2004) pada masa ini, kepala daerah tetap dipilih oleh DPRD namun pengaruh dari pemerintah pusat berkurang. Dan pada akhirnya Indonesia memasuki Era Pilkada Langsung (2005-sekarang) pada tahun 2004 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 disahkan, yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Pilkada pertama yang dilakukan secara langsung terjadi pada tahun 2005. Sistem ini dianggap lebih demokratis karena rakyat dapat memilih langsung pemimpin daerah mereka secara langsung. Pada tahun 2014 sempat terjadi perubahan melalui Undang-Undang No.22 Tahun 2014 yang mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Namun, karena penolakan luas dari masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengeluarkan Perppu yang membatalkan Undang-Undang tersebut, dan sistem pilkada langsung tetap diberlakukan.

Peran Generasi Z dalam Pilkada di Indonesia

Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa siswa/i kelas XII 5 SMAN 35 JAKARTA PUSAT Saat ini berada dalam usia 17-18 tahun, Sesuai dengan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2022 bahwa syarat untuk mengikuti pilkada adalah 17 tahun. Generasi Z memiliki peran yang semakin penting dalam Pilkada di Indonesia. Dengan karakteristik yang kritis, kreatif, dan adaptif terhadap teknologi, Generasi Z berpotensi memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Mereka menuntut pemimpin yang jujur, transparan, dan memiliki visi yang relevan dengan isu-isu kontemporer seperti lingkungan, keadilan sosial, dan kesetaraan. Kehadiran Generasi Z dalam Pilkada menambah dinamika baru dalam politik Indonesia, yang diharapkan mampu mendorong perubahan positif dalam sistem pemerintahan daerah.

SIMPULAN

Siswa/i kelas XII 5 SMAN 35 JAKARTA memiliki kemampuan untuk memahami konsep demokrasi substantif. Meskipun mereka sedang berada dalam fase remaja menuju dewasa, mereka memerlukan bimbingan dari orang dewasa karena mereka masih labil dalam mengambil keputusan. Program pendidikan seperti ini sangat penting diterapkan di berbagai sekolah untuk mendukung generasi muda dalam berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pada kenyataannya kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia masih kurang membahas materi tentang demokrasi substantif, sehingga diperlukan penambahan materi dan praktik yang relevan.

REFERENSI

- Athala, M. M. I.; Putri, S. A. A.; Pane, E. N.; Ramdhani, M. S.; Subakdi, S. Penerapan Pendidikan Demokrasi Substantif Bagi Siswa SMAS Yasporbi 1 Jakarta Dalam Mewujudkan Pemantapan Ketahanan Dan Tata Kelola Kepemerintahan Indonesia. JH2024, 4, 1-7.
- Herdiansah, A. G. (2017). Politisasi identitas dalam kompetisi pemilu di Indonesia pasca 2014. Jurnal Bawaslu, 3(2), 169-183.
- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Politicon: Jurnal Ilmu Politik, 2(1), 61-74.